

ETIKA PEMERINTAHAN : PERLUKAH ETIKA UNTUK PARTAI POLITIK DAN CALON MENJELANG PEMILU 2024

**Yoland Prambudi Haryanto¹, Dewi Noor Azijah²,
Lolita Deby Mahendra Putri³**

Universitas Singaperbangsa Karawang, Karawang, Indonesia^{1,2,3}

E-mail : yolandprambudi.h@gmail.com¹, dewinoor.azijah@fisip.unsika.ac.id²,
lolita.deby@fisip.unsika.ac.id³

ABSTRAK

Memasuki tahun yang krusial, tahun dimana diadakannya pesta demokrasi besar-besaran yang diadakan di Indonesia. Tahun 2024, pesta demokrasi untuk rakyat Indonesia untuk dapat menentukan pemimpin yang layak menjadi pemimpin dan pemimpin yang masih menggunakan etika dalam memimpin, karena terdapat beberapa pemimpin yang duduk dan memangku jabatan mengesampingkan etika dalam memimpin. Partai politik dan calon saling menjual citra diri, meningkatkan elektabilitas, dan membuat merekalah satu-satunya yang layak untuk dipilih namun, yang perlu diingat serta yang perlu masyarakat tanamkan di dalam pikiran dan perasaan mereka, perilaku memilih merekalah yang menentukan untuk pemimpin selanjutnya. Metode yang digunakan pada penelitian kali ini adalah metode kualitatif yang memiliki sifat deskriptif analitik. Pengumpulan data diambil melalui studi-studi literatur terkait dengan penelitian yang dimaksud. Fokus dari penelitian ini akan membuahkan hasil yang argumentatif mengenai pemimpin yang beretika-lah yang pastinya yang bisa memimpin, etika juga terdapat didalam pemerintahan itu sendiri yang dimana etika pemerintahan berfokuskan kepada norma hukum dan norma sosial. Pada hakikatnya merekalah pelayan masyarakat dan alat kelengkapan dalam pemerintahan yang bertugas untuk mewujudkan cita-cita luhur bangsa dan juga dapat membuat masyarakat sejahtera, dan bukan untuk mensejahterahkan kehidupan mereka dan atau kehidupan kelompok-kelompok tertentu.

Kata kunci : *Etika Pemerintahan, Partai Politik, Kesejahteraan Masyarakat, Pemilihan Umum*

ABSTRACT

Entering a crucial year, the year where a massive democratic party will be held in Indonesia. In 2024, the democratic party will be for the Indonesian people to be able to determine leaders who are worthy of being leaders and leaders who still use ethics in leading, because there are several leaders who sit and hold office ignoring ethics in leading. Political parties and candidates sell each other's self-image, increase their electability, and make them the only ones worthy of being elected,

however, what needs to be remembered and what people need to instill in their thoughts and feelings is that their voting behavior is what determines the next leader. The method used in this research is a qualitative method which has an analytical descriptive nature. Data collection was taken through literature studies related to the research in question. The focus of this research will produce argumentative result regarding ethical leaders who can certainly lead, ethics is also found in government itself, where government ethics focuses on legal norms and social norms. In essence, they are public servants and tools in government whose job is to realize the noble ideals of the nation and also to make society prosperous, and not to make their lives and/or the lives of certain groups prosperous.

Keywords : *Government Ethics, Political Parties, Community Welfare, General Elections*

PENDAHULUAN

Didalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi yang sangat kental yang dimana kedaulatan berada ditangan rakyat dan itu tertuang jelas pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 2 yang sudah tercantum dan dijelaskan tentang kedaulatan yang juga bisa diartikan sebagai kekuasaan itu sendiri berada ditangan rakyat.

Dengan realitas yang ada dan bisa menggunakan logika manusia untuk memahami baik menggunakan metode jasadiyah (memahami ilmu dan pengetahuan serta realitas yang ada dengan pancaindra), ruhaniyah (memahami ilmu dan pengetahuan serta realitas yang ada menggunakan pikiran, perasaan, dan ruh kita manusia), dan akhliyah (memahami ilmu dan pengetahuan serta realitas yang ada dengan menimbang baik dan buruk, benar dan salah). Posisi rakyat disini hanya digunakan para partai politik dan calon untuk sekadar mendapatkan kursi dan atau menjadi penguasa/pemimpin sekitar (Ulil Amri Minkum) setelah

mendapat apa yang diinginkan rakyat yang sudah menggunakan hak suara mereka seolah dilupakan dan tidak diperlukan lagi suara mereka yang membutuhkan uluran tangan para Ulil Amri Minkum.

Terekam jelas dengan realitas yang ada mereka seperti tutup mata, tutup telinga, tutup mulut, dan tutup pikiran, serta tutup hati mereka yang tadinya mereka menggaungkan segala rayuan dan bujukan untuk mendapatkan suara rakyat dan mengarahkan perilaku pemilih setiap individu yang ada untuk positif menilai mereka juga dapat mendongkrak elektabilitas mereka sebagai pemimpin mereka kelak dan mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang tertuang jelas di Undang-Undang Dasar 1945 pembukaan Alinea ke-4 tapi kenyataannya perilaku pemilih dari masyarakat masih salah dan tidak tepat untuk dapat memilih para calon Ulil Amri Minkum. Dari sinilah para calon pemimpin yang terpilih nantinya yang dapat mempengaruhi dan meberdayakan dengan baik dan benar

perilaku pemilih para rakyat yang termakan atas rayuan dan hasutan palsu itu tidak akan dirawat lagi dan semakin tidak diperdulikan justru mereka lebih memikirkan diri mereka dan partai politik mereka, suara konstituen sudah tidak diperdulikan dan lebih memperdulikan suara partai politik juga order-order yang bertujuan untuk memperkuat dan memepertahankan posisi mereka nantinya.

Negara demokratis yaitu negara Indonesia, dimana sistem pemerintahan berada dibawah sistem politik itu adalah realitas yang hampir semua masyarakat Indoensia ketahui, dari sanalah tak lepas kaitannya dengan partai politik yang dimana partai politik pasti selalu tergambar buruk dimata masyarakat Indonesia karena dengan kemajuan dunia digital informasi sudah bisa diakses dimana-mana sehingga masyarakat tidak mudah untuk dibodohi lagi saat ini, yang dimana partai politik saat ini pastinya selalu menunjukan ke-eksistensian mereka dengan menyebutkan dengan makna tersirat maupun tersurat adalah lembaga penyalur kepentingan-kepentingan kelompok tertentu sehingga rakyat bingung harus percaya kepada siapa lagi untuk dapat mensejahterakan hidup mereka.

Partai Politik sudah seharusnya bisa menjadi media penyerap aspirasi, kritik, saran dan masukan yang dilontarkan oleh masyarakat yang nantinya bisa menjadi bahan yang dikelola oleh pemerintahan sehingga

menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar sehingga bisa membuat masyarakat sejahterah, karena kebijak-bijaknya seorang pemimpin ialah seorang pemimpin yang bisa membuat kebijakan yang membuat semua masyarakatnya senang dengan kebijakan yang dibuat, nilai etika pemerintahan yang seharusnya bisa menangani itu semua baik dalam kelembagaan partai politik juga bagi para anggota partai serta para calon yang nantinya menjadi Ulil Amri Minkum, sehingga moralitas yang mereka akan dapat terjaga dan tidak terlena oleh harta dan takhta.

KAJIAN PUSTAKA

Sebuah penelitian terdahulu adalah suatu bentuk usaha dari seorang peneliti untuk dapat menemukan sebuah perbandingan dan agar dapat menciptakan sebuah inspirasi yang dapat membawa suatu inovasi didalam sebuah penelitian dalam bentuk kajian-kajian secara ilmiah dan mendapatkan hasil yang optimal untuk penelitian yang sedang diteliti oleh seorang peneliti. Dibagian ini peneliti mencantumkan penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang ingin diteiti oleh peneliti, yang kemudian peneliti membuat ringkasan penelitian terkait penelitian terdahulu, berikut adalah beberapa penelitian yang terkait tentang penelitian yang sedang peneliti kaji dan teliti saat ini.

Penelitian yang dilakukan oleh etika Endah (2018) yang berjudul “Etika Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik” didalam penelitian ini disebutkan bahwasanya Etika pemerintahan itu sumbernya adalah norma sosial dan norma hukum. (*Etika Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik*, t.t.). Yang dimana pemerintahan sangat butuh hal tersebut yang dimana itu dapat mengatur perilaku para apratur dan atau pemerintahan yang berkuasa, yang dimana pemerintahan ada adalah untuk dapat mewujudkan cita-cita luhur bangsa. Moral yang ditanamkan kepada para apratur dan atau pemerintahan yang sedang berkuasa akan menimbulkan kesadaran diri yang nantinya akan sadar bahwasanya mereka adalah pengemban cita-cita luhur bangsa dan membuat masyarakat sejahterah dan membuat kepercayaan didalam masyarakat semakin terbangun dan mempercayai pemerintah yang sedang berkuasa.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Liva Paisa, dkk. (2019) yang berjudul “Etika Pemerintahan Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara” didalam penelitian ini dikerucutkan lagi dan lebih diperdetail lagi bahwasanya etika pemerintahan ini sangat diperuntukan dan atau terfokus kepada para aparatur sipil negara atau orang yang terlibat didalam lembaga pemerintahan, ada ada faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi setiap individu.(Paisa dkk., t.t.). Selain itu pada penelitian kali ini mengkaji

juga mengenai partai politik sehingga harus ada beberapa penelitian terdahulu yang menjadi tinjauan untuk dikaji dan dijadikan suatu sumber inspirasi agar menciptakan inovasi baru terkait relevannya etika pemerintahan yang biasanya digunakan oleh para apratur sipil negara namun, pada penelitian kali ini akan dikaji dan diteliti apakah memberikan dampak bilamana etika pemerintahan digunakan untuk partai politik dan calon.

Judul penelitian terdahulu yang dijadikan tinjauan adalah “Partai Politik Dan Pembangunan Politik” yang diteliti oleh Elly Rosana (2012), didalam penelitian yang dikaji dan diteliti oleh beliau menjelaskan bahwasanya partai politik sangat memberikan dampak yang besar bagi negara yang demokratis ini karena diyakini sebagai prasyarat untuk bisa menjadi negara modern, yang dimana bilamana partai politik disini tidak menggaungkan dan menunjukan bahwasanya mereka adalah alat kepentingan kelompok tertentu dan penguasa, melainkan mereka adalah alat penyalur kepentingan masyarakat untuk menyampaikan segala aspirasi, kritik, saran dan masukan agar terciptanya komunikasi sua arah dari bawah ke atas dan juga dari atas kebawah, jika hal tersebut terlaksana dengan baik dan bijak maka fungsi partai politik akan berjalan optimal dan dapat menciptakan masyarakat yang sejahterah.(Rosana, t.t.).

Masuk kedalam ranah politik dan PEMILU tak lain erat hubungannya

mengenai perilaku pemilih dari masyarakat yang harus dikaji dan diteliti, yang dimana terdapat beberapa jurnal terdahulu yang menjadi acuan dan perbandingan agar terciptanya relevansi dari kedua unsur lainnya dengan perilaku pemilih. Diantaranya terdapat penelitian yang dilakukan oleh Idris Hemay dan Aris Munandar (2016) dengan judul “ Politik Identitas dan Pencitraan Kandidat Gubernur terhadap Perilaku Pemilih”.

Kemudian ada juga penelitian dengan judul “Perilaku Pemilih Menjelang Pemilu 2019” yang diteliti oleh Agus Machfud Fauzi (2019) dimana keduanya sama-sama menjelaskan mengenai perilaku pemilih dan unsur-unsur mana saja yang dapat mempengaruhi kemana arah perilaku pemilih, juga bagaimana para kandidat-kandidat dan atau para calon melakukan berbagai cara teknik marketing yang mereka miliki demi membuat elektabilitas para kandidat meningkat pesat.(Fauzi, t.t.).

Lalu ada juga salah satu peneliti yaitu Amirus Sodik (2015) membuat penelitian mengenai “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam” penelitian tersebut bertujuan untuk membahas tugas dan wewenang pemerintah yang seharusnya bisa membuat masyarakatnya sejahterah dengan perspektif Islam yang diangkat didalam penelitian tersebut, dan penelitian tersebut juga menjadi tinjauan pustaka yang cocok dikarenakan untuk menunjang penelitian yang akan dikaji

dan diteliti pastinya akan terfokus kepada bagaimana cara pastai politik dan para calon/kandidat (Ulil Amri Minkum) untuk dapat bisa menjalankan kewajiban beserta wewenang mereka untuk dapat mensejahterkan para warga masyarakat.(Sodiq, t.t.).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang dimana bahan yang dikaji dan diteliti kemudian dideskripsikan yang berarti penelitian ini bersifat deskriptif analitik. Yang dimana deskriptif analitik ini bertujuan untuk meneliti secara menyeluruh dan mendetail, membuat peneliti untuk dapat memberikan gambaran dan atau uraian suatu fenomena yang sedang dikaji dan diteliti.

Pada penelitian kali ini mempunyai 4 fokus penting yaitu, etika pemerintahan, partai politik, dan perilaku pemilih, serta kesejahteraan masyarakat yang dimana penelitian pada kesempatan kali ini peneliti akan mengkaji ke-4 komponen diatas dengan berbagai studi litelatur yang sudah dikumpulkan agar menemukan hasil penelitian dan kajian yang *fresh* untuk dapat digunakan didalam sistem politk di Indonesia yang dirasa sudah cukup usang, yang dimana penelitian kali ini akan memberikan *effect* besar bagi arah perubahan bangsa Indonesia melalui para Ulil Amri Minkum nantinya yang harus mulai memperhatikan etika pemerintahan yang dimana mereka juga

harus mulai memahami arti penting bahwasanya didalam memerintahkan suatu hal dan menjadi penguasa sekitar (Ulil Amri Minkum) mereka juga harus pandai dan bijak untuk mengambil suatu keputusan, dan menjadi keterwakilan para masyarakat Indonesia, juga mendengarkan aspirasi, kritik, saran dan masukan, hal itu akan bisa membuat perilaku pemilih lebih besar untuk dapat meningkatkan elektabilitas para kandidat yang akan maju pada PEMILU 2024 dan jangan dilupakan suara mereka adalah suara yang harus dipertanggungjawabkan untuk bisa mengemban amanah dan menjadi Ulil Amri Minkum yang sebaik-baiknya juga sebenar-benarnya, dan akan menciptakan masyarakat yang sejahterah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Etika Pemerintahan

Etika mempunyai asal kata “Etos” yang berasal dari Bahasa Yunani yang mempunyai arti watak kesusilaan atau adat kebiasaan.(Paisa dkk., t.t.).

Erat kaitannya etika mempunyai landasan filosofis, etika juga sebagai pemberi arah untuk membimbing perilaku seseorang dalam melakukan hubungan dengan manusia lain atau antar kelompok dengan kelompok lain agar harkat dan martabat sebagai manusia tetap terjaga yaitu dihormati, diakui, dilindungi.(*Etika Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik*, t.t.). Erat kaitannya pula etika dengan suatu kebenaran (ilmu filsafat) yang

menyajikan nilai moral didalamnya serta menjaga norma hukum dan norma sosial, kebenaran dibagi menjadi tiga diantaranya :

1. Kebenaran Pribadi (Etika) = Kebenaran yang hanya satu orang saja miliki dan tertanam didalam setiap masing-masing individu;
2. Kebenaran Kelompok & Kebenaran Universal (Moral) = Dimana kebenaran ini sudah menjadi kesepakatan kelompok-kelompok tertentu dengan mempertimbangkan sosial dan budaya yang terkandung didalamnya dnegan memperhatikan hukum;
3. Kebenaran Mutlak (Akhlak) = Kebenaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT) dan kebenaran ini mutlak adanya dan segala kebenarannya tidak bisa diganggu gugat oleh setiap manusia dimuka bumi ini.

Etika dibagi menjadi dua jenis etika, yaitu diantaranya :

1. Etika Filosofis, yang dimana Etika memiliki sifat praktis dan non-empiris. Etika ini berkaitan dengan ilmu filsafat yang dimana bersifat *singular, particular*, dan *universal*. Semua itu berkaitan juga tentang logika manusia yang bisa memahami segala realitas dan atau memahami apa yang harus dipahami oleh manusia itu sendiri dengan menggunakan metode jasadiyah, ruhaniyah, dan akhliyah.

2. Etika Teologis, dimana teologis merupakan ilmu yang mempelajari tentang ketuhanan, etika ini terfokuskan kepada etika-etika yang berada didalam suatu agama yang ini masih ada keterkaitannya dengan kebenaran mutlak (Akhlak) yang dimiliki oleh seorang manusia.(Paisa dkk., t.t.).

Filsafat berasal dari kata Yunani yaitu *Phylosophia*, *Phylos* yang berarti “cinta” dan *Sophia* yang berarti “Kebijaksanaan” bilamana disatukan *Phylosophia* berarti cinta kebijaksanaan yang dimana didalam etika sendiri didalamnya yang mengandung makna yang begitu penting didalam berkehidupan, berbangsa, dan bernegara bagi seorang pejabat negara itu sendiri, supaya dapat membimbing para pejabat negara dengan tingkah laku mereka dan terhindar dari tindakan yang buruk dan menggambarkan citra pejabat negara yang memiliki tindakan positif dan juga memiliki nilai moralitas didalam diri masing-masing individu para pejabat negara.

Dan terdapat relevansi yang erat antara etika dan filsafat, diantaranya :

1. Jasadiyah = Didalam jasad manusia yang mempunyai panca indera etika perlu diterapkan, karena dengan adanya etika segala bentuk Tindakan yang dilakukan oleh panca indera dapat terjaga;
2. Ruhaniyah = Dalam pikiran, perasaan, dan ruh seorang pejabat publik pastinya membutuhkan

etika yang dimana, segala bentuk hal yang abstrak dan akan dilakukan oleh panca indera nantinya dapat mematuhi segala norma yang berlaku;

3. Akhliyah = Dengan dapat memahami baik dan buruk, benar dan salah dapat menjadikan nilai moralitas terjaga dengan sangat kuat dan kokoh.

Dapat diuraikan bahwa etika pemerintahan ternyata sangat amat dibutuhkan baik dalam pemerintahan dan dalam partai politik dan para kandidat (sistem politik), karenanya yang mengatur sistem pemerintahan itu adalah sistem politik, dengan data dan fakta yang dapat membangun pondasi realitas yang ada banyak partai politik dan para pejabat negara yang tak beretika sehingga untuk dapat mewujudkan cita-cita luhur bangsa tidak dapat tercapai dengan tingkah laku yang tidak mencerminkan sebagai seorang *Ulil Amri Minkum* yang dimana etika adalah bentuk dari kumpulan-kumpulan asas dan nilai moral yang dapat mengatur dan menjadi pedoman tingkah laku seorang manusia.

2. Partai Politik

Di negara demokratis pastinya tak lepas dari partai politik, sangat disayangkan stigma negatif yang selalu tersebar luas dimasyarakat Indonesia mengenai partai politik. Partai politik juga keberadaannya adalah suatu bentuk badan hukum yang dimana dapat dilihat juga sebagai suatu bentuk kebebasan hak asasi manusia, hak asasi manusia

yang dimaksud disini adalah hak asasi manusia untuk dapat berorganisasi dan berserikat serta berkumpul.

Dalam arti umum dan atau luas, partai politik adalah sekelompok masyarakat yang membentuk sebuah organisasi yang tak terbatas secara umum pada organisasi politik saja. Sedangkan dalam arti yang lebih kecil, partai politik, yaitu sebuah organisasi masyarakat yang terfokuskan pada bidang politik.

Bisa diartikan partai politik juga sebuah organisasi, organisasi formal yang dimana mempunyai konstitusi (regulasi) dan terstruktur. Organisasi ini juga merupakan penyalur baik itu aspirasi, kritik, saran dan masukan yang ingin disampaikan masyarakat kepada pemerintah dan atau para pemangku jabatan (pejabat negara) dan sudah seharusnya partai politik sebagai penyalur kepentingan rakyat sehingga dapat menciptakan komunikasi dua arah dari atas kebawah, juga dari bawah keatas, dan justru bukan sebagai penyalur kepentingan kelompok untuk berkuasa, partai politik juga tidak mudah dan sembarangan dibuat tanpa adanya tiga hal penting yang harus diperhatikan, yaitu : 1. Teori Kelembagaan, dimana aspek ini terfokuskan kepada antara hubungan parlemen dan sebab-akibat partai politik tersebut ingin dibentuk; 2. Teori Situasi Historik, aspek ini menimbang dengan adanya partai politik yang dibuat dapat mengatasi fenomena masalah yang timbul ditengah masyarakat; 3. Teori

Pembangunan, yang dimana aspek ini melihat dari perspektif bahwasnya partai adalah produk yang bisa membuat sosial ekonomi negara menjadi kearah modern.

Jika melihat dari fungsi partai politik, partai politik mempunyai fungsi utama mendapatkan kekuasaan, mencari kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Namun partai politik juga bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan nilai moral dan etika sehingga dapat mengatasi krisis fenomologi ditengah masyarakat kearah yang lebih baik bisa ditarik kesimpulan terdapat 4 pokok fungsi bahwasnya partai politik sebagai sarana komunikasi politik, rekrutmen politik, sarana sosialisasi politik, dan pengatur politik. Terbukti hal tersebut menyatakan sistem pemerintahan dikendarai dan atau diatur lagi oleh sistem politik yang dapat menyeimbangkan kondisi masyarakat dengan berbagai fenomologi didalamnya.

3. Perilaku Pemilih dan Kesejahteraan Masyarakat

Semakin mendekat dengan pemilihan semakin gencar juga partai dengan calon saling bahu-membahu meningkatkan elektabilitas untuk mendapatkan suara-suara masyarakat yang berterbangan bebas dengan kondisi politik yang sangat dinamis nanti untuk PEMILU 2024.

Warga masyarakat disini menjadi kunci utama untuk kemajuan bangsa kedepannya dan untuk dapat

menentukan kemana arah bangsa akan dibawa dengan menentukan Ulil Amri Minkum (Penguasa Wilayah Sekitar) ditahun 2024 nanti, ini berhubungan dengan perilaku pemilih yang dimana perilaku pemilih disini adalah keterlibatannya masyarakat dalam PEMILU dan membuat keputusan politik yang masyarakat akan ambil pada pemilihan umum nanti.

Perilaku pemilih juga erat kaitannya mengenai berbagai aspek diantaranya, aspek agama, aspek isu-isu dan kebijakan politik, dan aspek yang landasi dengan rasa yang terwakilkan oleh para kandidat.(Sofianto, 2015). Selain itu ada juga penjelasan yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih, apa saja itu :

1. Penjelasan Sosiologis = Penjelasan ini mengidentifikasi perilaku pemilih melalui kelas sosial dan kedudukan sosial bagi partai politik maupun kandidat yang mencalonkan diri;
2. Penjelasan Psikologis = Dari penjelasan ini memiliki relevansi dengan perilaku pemilih yaitu dapat mengidentifikasi partai dan kandidat dengan melalui pikiran dan perasaan yang dimaksud;
3. Penjelasan Pilihan Rasional = Didalam penjelasan ini melihat perilaku pemilih melalui pertimbangan analisis untung dan rugi. (*Politik Identitas dan Pencitraan Kandidat Gubernur terhadap Perilaku Pemilih*, t.t.).

Perilaku pemilih dimasyarakat akan kuat dan semakin timbul untuk menentukan siapa yang dipilih nantinya adalah dengan cara menggunakan komunikasi politik berbasis agama dan suku/budaya, dari sini akan mempengaruhi dan membuat perilaku pemilih menimbang secara sosiologis.

Menurut Akhyar Anshori dan Abrar Adhani (2019) Kesamaan agama, suku, saran dari keluarga menjadi faktor terbesar yang menjadi pertimbangan dari pemilih.(Junaedi & Sukmono, t.t.). Mengapa dikatakan demikian bahwasanya agama, suku, dan saran keluarga bisa mempengaruhi sosiologis pemilih dikarenakan, *pertama*, karena agama bisa menjadi pilihan untuk pemilih karena sesuai dengan keyakinan mereka dan bisa lebih meyakinkan mereka bahwasanya kandidat tersebut layak dipilih. *Kedua*, banyak orang desa yang minim terbatasnya sumber informasi yang masuk sehingga dibuai dengan janji-janji manis sedikit dengan sedikit bantuan juga tentunya itu sudah dapat mempengaruhi perilaku pemilih mereka dengan alasan kesamaan suku dan budaya antara pemilih dan kandidat. *Ketiga*, Pemilih pemula yang masih paham betul mengenai kondisi perpolitikan dilapangan menjadi *swing voter* yang suaranya mudah terombang-ambing yang dimana keluarga dan teman dekatlah yang bisa membuat perilaku pemilih dia terbentuk.

Hal diatas lah yang masih sering terjadi, salah satu contohnya adalah sewaktu tahun 2019 sebelum Joko

Widodo menjadi presiden keperiode kedua beliau sudah amat dikenal dengan keturunan asli Jawa dan seseorang yang kental dengan watak yang ramah dan sangat memerankan peran sebagai orang dengan suku Jawa, kemudian Joko Widodo mencari Wakil Presiden dengan *background* agamis supaya dapat meningkatkan elektabilitasnya yang sudah diketahui KH Ma'ruf Amin merupakan ulama yang lahir dan besar ditengah organisasi keagamaan juga kemasyarakatan yaitu Nahdlatul Ulama (NU) dan KH Ma'ruf Amin juga mantan Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari sini terlihat jelas yang dapat memengaruhi perilaku pemilih adalah dengan ketiga komponen penting diatas yaitu, suku, agama, dan saran keluarga dan atau teman dekat.(Fauzi, t.t.). Dari sinilah muncul pertanyaan yang besar apakah kesejahteraan akan muncul bilamana kita hanya menilai dan memilih Ulil Amri Minkum (Penguasa Wilayah Sekitar) hanya dengan faktor-faktor disebutkan diatas, tentunya tidak. Sedikit memahami mengenai tentang Kesejahteraan Sosial yang dimana tertuang jelas pada UU No.11 tahun 2009 Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosol warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan siri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Sedangkan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah Upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah

daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitas sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

Terdapat pula indikator dari kesejahteraan yang tertuang pada Al-Qur'an surat Quraissy ayat 3-4 "Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan (pemilik) rumah ini (Ka'bah). Yang telah memberikan makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut" Tertuang dan tercantum jelas terdapat 3 indikator kesejahteraan yaitu, menyembah Tuhan Yang Maha Esa (Allah SWT), rasa lapar dan rasa takut hilang dari setiap manusia dan atau individu.

KESIMPULAN

Etika Pemerintahan yang digunakan untuk para apratur sipil negara ternyata sangat perlu juga dipelajari dan diterapkan oleh para pejabat negara, dikarenakan etika pemerintahan mempunyai dua fungsi utama, yaitu :

1. Etika Pemerintahan disini adalah pedoman, acuan, dan referensi serta tuntutan yang dilakukan oleh pejabat negara untuk melakukan kewajibannya untuk dapat mensejahterkan masyarakat;
2. Etika Pemerintahan berfungsi untuk para pejabat publik dapat mengambil keputusan dengan bijak dan benar dalam menstailkan

fenomena-fenomena yang terjadi akibat politik ditengah masyarakat.

Etika juga dapat mengatur tingkah dan perilaku kelompok dan atau perseorangan, terdapat pula nilai-nilai penting didalam Etika Pemerintahan, diantaranya :

1. Menghormati HAM;
2. Menciptakan kejujuran baik dalam kelompok maupun perseorangan;
3. Menjunjung tinggi nilai keadilan dalam berorganisasi;
4. Memperkuat kebenaran dalam diri dan atau kelompok;
5. Dapat membedakan mana yang Hak dan Batil; dan
6. Dapat menciptakan perilaku yang professional baik dalam diri maupun kelompok.

Seiring berkembangnya zaman masyarakat sudah menjadi pemilih yang rasional dan dengan adanya etika pemerintahan didalam suatu partai politik dan atau untuk para anggota dan kandidat Ulil Amri Minkum nantinya baik elektabilitas partai politik dan kandidat akan patut diperhitungkan, dan yang perlu diperhatikan fungsi pastai politik akan ter-realisasikan dengan optimal, ada beberpaa fungsi partai politik menurut UU No.31 tentang partai politik, yaitu :

1. Pendidik politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi WNI RI yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

2. Menciptakan iklim yang kondusif sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterkan masyarakat;
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara. Partisiapasi politik WNI dan rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

Fungsi-fungsi yang tertera diatas akan ter-realisasikan sebagaimana mestinya jika para partai politik dan kandidat juga memperhatikan etika pemerintahan dan menerapkannya baik itu cita-cita luhur bangsa yang dengan niat hati yang tulus dan rasa semangat juang yang tinggi sebagai media kepentingan masyarakat partai politik dan kandidat bisa mewujudkannya. Tidak lupa juga dengan adanya etika dalam berpolitik nantinya citra diri yang tergambar dimasyarakat luas bagi pastai politik maupun kandidat akan tampak elegan dan menghilangkan citra buruk bagi partai politik dan kandidat.

DAFTAR PUSTAKA

Etika Pemerintahan Dalam Pelayanan Publik. (t.t.).

Fauzi, A. M. (t.t.). *Perilaku Pemilih Menjelang Pemilu 2019.*

- <http://journal2.unusa.ac.id/index.php/JIC>
- Junaedi, F., & Sukmono, F. G. (t.t.). *Komunikasi politik di Indonesia*.
- Paisa, L., Gosal, R., & Monintja, D. (t.t.). *Etika Pemerinthan Dalam Meningkatkan Kinerja Aparatur Sipil Negara*.
- Politik Identitas dan Pencitraan Kandidat Gubernur terhadap Perilaku Pemilih*. (t.t.).
- Rosana, E. (t.t.). *PARTAI POLITIK DAN PEMBANGUNAN POLITIK*.
- Sodiq, A. (t.t.). *KONSEP KESEJAHTERAAN DALAM ISLAM*.
- Sofianto, A. (2015). The Role of Religion in Voters' Preference During General Election 2014 in Central Java DI JAWA TENGAH. *Analisa*, 22(2), 161. <https://doi.org/10.18784/analisa.v22i2.192>